

BAB VI. KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dengan model PLS-SEM menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4.1.1.4, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting pengaruh institusi informal terhadap hasil program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dalam perspektif ekonomi politik kelembagaan baru:

Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Institusi Informal terbukti berpengaruh signifikan atau jauh lebih besar dari pada Institusi Formal terhadap program pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada diagram 8 hasil pengujian jalur model menggunakan PLS-SEM.

Kedua, Pengaruh isntitusi informal melalui media tatakelola mencapai 0.702 dari pada institusi formal yang hanya 0.096. Norma sosial seperti patronase lokal, kebiasaan lama yang mengakar, birokrasi lokal, berperan terhadap aturan yang dinegosiasikan di tingkat pelaksana dan penerima manfaat. Temuan ini terlihat dari besarnya koefisien pengaruh variabel Institusi Informal terhadap variabel tata kelola dibandingkan dengan pengaruh institusi formal terhadap tata kelola, serta tingkat signifikansi angka statistik yang lebih kuat dalam model PLS-SEM yang di estimasi dan di predksi.

Ketiga, model pengaruh yang dibangun dalam penelitian ini memperlihatkan jalur sangat dominan. Yaitu institusi informal→tata kelola→program kemiskinan dari pada jalur pengaruh lainnya. Ini menjadi jalur pengaruh yang paling kuat atau jauh mengungguli jalur Institusi Formal→Tata Kelola maupun efek langsung institusi (formal maupun informal) terhadap program kemiskinan. Hal ini berarti bahwa perubahan pada tata kelola program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen pada praktiknya lebih banyak dimediasi dan ditentukan oleh kekuatan informal (aktor dan relasi lokal, kedekatan personal dan patronase, serta kebiasaan administratif model lama) daripada perbaikan formal kelembagaan.

Tata kelola (*governance*) terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja program pengentasan kemiskinan. Kualitas tata kelola yang tercermin dari transparansi, akurasi data sasaran, konsistensi pelaksanaan prosedur, serta akuntabilitas administratif, berhubungan langsung dengan efektivitas program kemiskinan. Dalam konteks ini, peringkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Kebumen tidak dapat dilepaskan dari tata kelola yang masih dibatasi oleh praktik informal yang kuat. Sehingga kapasitas aturan formal untuk menghasilkan perubahan substansi menjadi kabur dan lemah.

Temuan ini mengonfirmasi secara kuat teori kelembagaan Douglass C. North bahwa Institusi Informal yang tidak tertulis sulit berubah, dan lebih menentukan perilaku aktor daripada Institusi Formal yang tertulis. Peraturan teknis pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen relatif memadai dalam arti berubah cepat, namun efektivitasnya ditentukan oleh bagaimana aturan tersebut ‘disaring’ melalui kebiasaan birokrasi model lama, dan perilaku sosial yang bersifat informal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memverifikasi relevansi teori North, tetapi juga menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Kebumen merupakan akibat dari ketidaksinkronan antara desain institusi formal dengan struktur institusi informal yang mengatur distribusi sumber daya dan akses kebijakan.

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah yaitu terdapat pengaruh institusi informal yang signifikan dan dominan terhadap program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa institusi informal membentuk pola tata kelola yang mengukur program menjangkau kelompok miskin atau tidak. Aturan formal cenderung berfungsi sebagai kerangka umum yang memberi legitimasi hukum dan administratif, tetapi arah implementasinya sangat dipengaruhi oleh norma dan jaringan informal. Perubahan kelembagaan yang terjadi selama ini lebih bersifat prosedural (perubahan regulasi, penyesuaian skema teknis), sementara struktur institusi informal yang menopang praktik perilaku negatif, tidak berubah atau telah membudaya, sehingga capaian program terhadap penurunan peringkat kemiskinan menjadi lambat.

Secara teoretis, temuan hasil penelitian ini memberikan arti penting bagi pengembangan ilmu ekonomi politik kelembagaan dan kebijakan sosial. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa analisis kemiskinan tidak memadai jika hanya menekankan desain program dan indikator kinerja formal, tetapi harus menempatkan institusi informal sebagai variabel kunci yang menjembatani antara struktur kekuasaan lokal dan desain kebijakan. Tantangannya adalah mendesain institusi formal sebagai kekuatan, bukan sebagai hambatan karena pola lama.

Secara kebijakan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa strategi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen tidak cukup dilakukan melalui perbaikan regulasi, perbaikan pendataan, peningkatan anggaran, atau penambahan jenis bantuan sosial. Tetapi, menuntut intervensi pada tata kelola yang memperhatikan peran institusi informal. Di sisi lain, institusi informal seperti perilaku aktor harus sesuai dengan aturan pemerintah dalam arti mendukung penguatan mekanisme akuntabilitas dan kontrol terbuka oleh publik, pembatasan ruang nepotisme aparat dan birokrasi, sehingga institusi informal menciptakan tatakelola yang baik dan peluang keberhasilan yang tinggi. Upaya penyadaran bagi para aktor yang menyimpang seyogyanya masuk dalam desain kebijakan dalam penguatan sumber daya manusia pelaksana program.

Bagi masyarakat dan aktor ekonomi politik, kesimpulan ini menegaskan bahwa hubungan antara warga, aktor lokal, dan birokrasi dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen perlu diperbaiki khususnya bagian institusi informal. Akses terhadap program, keberlangsungan bantuan, dan kualitas pelayanan sosial sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan informal. Dalam konteks North dan pada faktanya, pengentasan kemiskinan merupakan arena kontestasi ekonomi politik, di mana institusi informal bukan sekadar penghambat atau pendukung kebijakan, melainkan arena yang menentukan siapa yang diakui sebagai keluarga/orang miskin, siapa yang mendapat prioritas, dan bagaimana sumber daya ekonomi (anggaran) didistribusikan.

6.2 Implikasi dan Kontribusi

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi bagi pengembangan studi ekonomi politik, teori kelembagaan dan perbaikan upaya pengentasan kemiskinan di daerah, khususnya di Kabupaten Kebumen sebagai kelompok derah termiskin di Provinsi Jawa Tengah:

Pertama, hasil penelitian menegaskan Institusi Informal sebagai variabel atau komponen utama, bukan hanya faktor pelengkap. Model yang dihasilkan memperlihatkan bahwa institusi informal tidak hanya memoderasi, tetapi memediasi secara dominan mempengaruhi tata kelola. Selanjutnya, tata kelola menentukan hasil program pengentasan kemiskinan.

Kedua, penelitian ini memperluas penerapan atau pengecekan teori institusi Douglass C. North ke dalam konteks program pengentasan kemiskinan di tingkat daerah. Di Kabupaten Kebumen, hasil ini menunjukkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh desain institusi formal yang tidak mengakomodir institusi informal. Hasil ini menempatkan desain kelembagaan mempertimbangkan mekanisme berimbang antara formal dan informal. Formal dengan khas *topdown* pemerintah karena bersifat implementatif, informal dengan khas *bottom up* di masyarakat yang memiliki aturan sosial. Keduanya untuk menjadikan tata kelola ideal atau kuat sehingga hasil program pemgentasan kemiskinan akan berhasil. Jika melihat hasil penelitian ini, maka porsi berdasarkan pengaruh Institusi Informal dalam tata kelola jauh lebih besar daripada Institusi Formal. Mendorong institusi informal untuk mendukung atau memperkuat peraturan yang tidak dinegosiasikan akan menjadi faktor pendukung keberhasilan program menjadi menarik untuk penelitian selanjutnya.

Pada ranah kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen tidak dapat lagi bertumpu pada pendekatan teknokratis seperti perbaikan regulasi dari tahun ke tahun mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penambahan anggaran dan memperbanyak jenis bantuan serta penerima manfaat. Kedepan, menjadi strategis jika intervensi kebijakan dirancang untuk memperkuat tata kelola yang selama ini

di dominasi oleh institusi informal yang mempertahankan pola lama seperti nepotisme. Institusi politik seperti Partai Politik dan anggota legislatif yang memiliki basis konsituen dan terdapat kesempatan turun melalui reses atau kunjungan lainnya perlu masuk ke ranah informal dalam hal memperbaiki pengaruh informal sebagai pendukung tata kelola yang sesuai peraturan, sehingga tidak sebagai faktor penghambat. Perlu upaya penyadaran dari semua pihak kepada institusi informal pada bagian yang menghambat.

Diantara upaya penguatan tata kelolanya kedepan adalah; 1) penyadaran aktor informal agar sesuai aturan formal, penguatan mekanisme akuntabilitas publik dan partisipasi terbuka untuk mengurangi ruang klientelisme. 2) penataan ulang sistem data yang akurat untuk mencegah ruang ketidakjujuran informal. 3) konsolidasi kelembagaan lintas sektor yang mengurangi ketergantungan pada kekuatan segelintir elit ekonomi dan patronase sosial dan politik.

Secara praktis, pemerintah daerah, lembaga pelaksana program, dan aktor masyarakat sipil perlu menggeser fokus dari sekadar “menjalankan program” menjadi ‘membenahi’ tata kelola program’. Hal ini mencakup pemberian prosedur pendataan yang adil, verifikasi dan update perubahan status penerima manfaat pasca menerima bantuan, transparansi alokasi serta realisasi bantuan. Di sisi lainnya, perlu pembatasan ruang intervensi aktor lokal dalam memainkan penerima manfaat seperti balas budi basis dukungan suara ketika Pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa. Upaya perbaikan sistem seperti reformasi birokrasi, penguatan kapasitas aparatur pelaksana, dan saluran pengaduan masyarakat yang efektif untuk dapat mengontrol secara langsung dan mudah terhadap kebijakan yang sedang berjalan.

Implikasi bagi masyarakat, khususnya kelompok keluarga penerima manfaat bantuan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa akses terhadap program pengentasan kemiskinan masih dipengaruhi oleh relasi dan birokrasi lokal yang menerapkan pola lama. Kepastian hak atas bantuan sosial sering kali dinegosiasikan melalui hubungan kedekatan personal dan patronase. Kondisi ini berpotensi mengulang budaya ketergantungan dan kerentanan politik kelompok

miskin terhadap aktor-aktor lokal yang menguasai akses terhadap sumber daya negara. Hal ini bisa dicermati dalam gelaran politik Pemilu, Pilkada sampai Pilkades.

Bagi aktor ekonomi dan elit lokal, politisi, birokrat, serta pemangku kepentingan lainnya, penelitian ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan arena yang bebas kepentingan. Program dan bantuan sosial berfungsi sekaligus sebagai instrumen kebijakan, penguatan ekonomi dan sumber daya politik. Jika institusi informal dibiarkan tetap mendominasi dengan pola lama dan tanpa mekanisme akuntabilitas serta kontrol yang kuat, maka kinerja program kemiskinan akan terus berlanjut, bertahan dan tidak berubah signifikan dari sisi peringkat kemiskinan. Karena itu, memperbaiki bagian yang buruk pada Institusi Informal seperti upaya penyadaran kepada aktor lokal menjadi syarat memperkuat tata kelola ideal yang berimbang dengan institusi formal yang dibuat oleh pemerintah, sehingga hasil program menjadi efektif dan kemiskinan berkurang signifikan.

